



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

**RENJA
BKD PROVINSI RIAU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019. Rancangan akhir Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rancangan akhir Rencana Kerja ini merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, yang mana proses dalam penyusunan rencana kerja ini berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra perangkat daerah. mendukung melaksanakan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan melalui program dan kegiatan mewujudkan tujuan akhir dari proses pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik OPD tahun 2019.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rancangan Rencana Kerja Akhir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019. Dalam rangka mencapai kesempurnaan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, kami membuka pintu untuk menerima saran dan masukan menuju arah yang lebih baik.

Pekanbaru, Juli 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650904 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-3
I.3. Maksud dan Tujuan	I-4
I.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-7
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-8
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-14
II.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-20
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-5
III.3. Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2017 Provinsi Riau	II-2
Tabel 2.4.	Review Rancangan Akhir RKPD 2019	II-15
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah provinsi, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sampai dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Yang di maksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan memastikan kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi juga dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi rancangan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang telah ditetapkan melalui

Pemerintah Provinsi menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), RAPBD dan APBD Provinsi.

I.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014 – 2019;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019; dan
 13. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2019;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019;
4. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun lalu; dan
5. Evaluasi hasil Rencana Kerja BKD Provinsi Riau tahun berjalan.

Adapun tujuan dari Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah;

1. Terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Riau;
2. Tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
3. Terlaksananya program dan kegiatan BKD Provinsi Riau di tahun 2019;
4. Tercapainya sasaran dan target program kegiatan BKD Provinsi Riau tahun 2019.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai .

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian.

Berhasil atau tidaknya rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2018:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018
Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisas Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran								339,50
1.20.1.20.10.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	20.100 surat	7.400 surat	1.600 surat	1.600 surat	86	3.200 surat	12.200	61
1.20.1.20.10.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	76	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	70 unit	28 unit	14 unit	14 unit	95	14 unit	56	80
1.20.1.20.10.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	97	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	75	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan Dan Penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	92	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	24 bulan	1.045 unit	1.045 unit	99	899 unit	1.968	3.280
1.20.1.20.10.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bln	422 unit	434 unit	179 unit	179 unit	100	17 unit	630	149
1.20.1.20.10.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	94	12 bulan	48	80
1.20.1.20.10.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	53.308 orang	22.352 orang	10.920 pors	10.920 pors	100	4.620 pors	37.892	71
1.20.1.20.10.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	500 kali	299 kali	123 kali	123 kali	89	100 kali	522	104
1.20.1.20.10.01.019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor BKP2D	92 orang	35 orang	23 orang	23 orang	97	23 orang	81	88
1.20.1.20.10.01.116.	Pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau expo)	Jumlah Pameran Pembangunan (Riau Expo) yang diikuti	5 pameran	2 pameran	1 kali	1 kali	99	1 kali	4	80
1.20.1.20.10.01.124.	Rapat Koordinasi BKD se-Provinsi Riau	Jumlah dokumen Rapat Koordinasi BKP2D Se-Provinsi Riau	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	98	1 dokumen	4	100
	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja					86,05			100,70
1.20.1.20.10.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	9 unit	4 unit	2 unit	2 unit	96	2 unit	8	89
1.20.1.20.10.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor	288 unit	30 unit	86 unit	86 unit	52	189 unit	305	106
1.20.1.20.10.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	3.040 unit	2.199 unit	523 unit	523 unit	96	562 unit	3.284	108
1.20.1.20.10.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	2 unit	1 unit	1 paket	1 paket	100		2	100
	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur					50,76			135,70
1.20.1.20.10.03.006.	Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental	620 orang	168 orang	120 orang	120 orang	100	135 orang	423	68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisas Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.03.013.	Pemantauan disiplin PNS	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin PNS	5 dokumen	2 dokumen	20 %	20 %	91	20 %	42	840
1.20.1.20.10.03.014.	Penanganan Kasus-kasus kepegawaian	Jumlah Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian	150 kasus	60 kasus	80 %	80 %	98	80 %	220	147
1.20.1.20.10.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah Konseling Psikologi Permasalahan ASN	750 orang	300 orang	150 orang	150 orang	93	48 orang	498	66
1.20.1.20.10.03.019.	Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang melaporkan (LHKPAN)	9.036 orang	7.912 orang	1.124 orang	1.124 orang	75		9.036	100
	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 80 jam pelajaran pertahun		164 orang	58 orang	65 orang	7,74			14,38
1.20.1.20.10.05.025.	Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara	79 orang	64 orang	18 orang	18 orang	56		82	104
1.20.1.20.10.05.026.	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	98 orang	50 orang	25 orang	25 orang	49	44 orang	119	121
1.20.1.20.10.05.032.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	60 orang	50 orang	15 orang	22 orang	80		72	120
	PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas, persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan					65,66			55,00
1.20.1.20.10.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		3	75
1.20.1.20.10.06.002.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100		4	80
1.20.1.20.10.06.003.	Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		3	75
1.20.1.20.10.06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	91		3	75
1.20.1.20.10.06.005.	Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya Rencana Startegis (RENSTRA) SKPD	12 dokumen	2 dokumen			-		2	17
1.20.1.20.10.06.005.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD	12 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100		7	58
1.20.1.20.10.06.009.	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	12 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100		9	75
1.20.1.20.10.06.028.	Pelaporan barang milik daerah	Jumlah Pelaporan Barang Milik Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		2	40
	PROGRAM : PENDIDIKAN KEDINASAN	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun					54,12			42,84
1.20.1.20.10.28.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah orang yang mendapatkan Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara	176 orang	54 orang	38 orang	38 orang	95	45 orang	137	78
1.20.1.20.10.28.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM I)	6 orang	2 orang	2 orang	2 orang	93	1 orang	5	83
1.20.1.20.10.28.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM II)	39 orang	23 orang	4 orang	4 orang	84	10 orang	37	95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisas Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.28.013.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah orang Diklat Kepemimpinan (PIM 2,3,4)	300 orang	200 orang	60 orang	60 orang	79		260	87
1.20.1.20.10.28.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah bantuan pendidikan ikatan kedinasan	284 orang	17 orang	17 orang	17 orang	82	25 orang	59	21
	PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja pertahun					20,25			17,73
	Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	Jumlah pegawai yang mengikuti koordinasi dan konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau	429 orang	-	143 orang	143 orang	93	143 orang	286	-
1.20.1.20.10.29.044.	Diklat Teknis ke Widyaiswara Berjenjang	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Teknis KeWidyaiswaraan Berjenjang	68 orang	64 orang	4 orang	4 orang	46		68	100
1.20.1.20.10.29.045.	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur	60 orang	40 orang	19 orang	19 orang	89		59	98
1.20.1.20.10.29.049.	Seleksi Asesor Provinsi Riau	Jumlah Asesor Provinsi Riau	65 orang	15 orang	50 orang	50 orang	92		65	100
1.20.1.20.10.29.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah Kapasitas Asesor Provinsi Riau	80 orang	15 orang	15 orang	15 orang	86	15 orang	45	56
	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan untuk peringatan HUT KORPRI	6 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	83	2 kegiatan	3	50
	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dengan tugas pokok dan fungsi					48,63			4.439,30
1.20.1.20.10.30.006.	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan Penghargaan PNS Berprestasi	95 orang	54 orang	18 orang	18 orang	99		72	76
1.20.1.20.10.30.030.	Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah SKPD yang mengikuti Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa beban kerja	2 dokumen	1 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	92		2	100
1.20.1.20.10.30.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Pegawai yang menerima Satya Lencana Karya Satya	2.144 orang	644 orang	500 orang	500 orang	98	500 orang	1.644	77
1.20.1.20.10.30.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen PNS Se Provinsi Riau	5 dokumen	2 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	86	75 orang	177	3.540
1.20.1.20.10.30.047.	Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKD	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bimtek Pegawai BKP2D	109 orang	62 orang	15 orang	12 orang	95	12 orang	86	79
1.20.1.20.10.30.057.	Monitoring IPDN	Jumlah Dokumen Monitoring IPDN	5 dokumen	2 dokumen	15 praja	150 praja	79	126 praja	278	5.560
1.20.1.20.10.30.058.	Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara	Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara	4 dokumen	1			-		1	25
1.20.1.20.10.30.060.	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	5 dokumen	2	500 orang	500 orang	93	120 orang	622	12.440
1.20.1.20.10.30.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah Dokumen Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	5 dokumen	2 dokumen	500 SKP	500 SKP	68	360 orang	862	17.240
1.20.1.20.10.30.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jangka Waktu Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1.086 orang	336 orang	250 orang	250 orang	96	250 orang	836	77
1.20.1.20.10.30.069.	Seleksi Penerimaan IPDN	Jumlah Penerimaan IPDN	188 orang	23 tahun			-		23	12
100	MTQ Nasional KORPRI							130 orang		
1.20.1.20.10.30.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Orang/asn yang mengikuti Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1.640 orang	580 tahun	650 orang	650 orang	97	400 orang	1.630	99
1.20.1.20.10.30.071.	Rakor Widyaiswara	Jumlah dokumen Rakor Widyaiswara	5 dokumen	2 dokumen			-		2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisas Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.30.073.	Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	5 dokumen	1			-	6000 dokumen	6.001	120.020
	Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti							20 orang		
1.20.1.20.10.30.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah waktu Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik (e-document)	6.000 dokumen	3.000 dokumen	2.000 dokumen	2.000 dokumen	100		5.000	83
1.20.1.20.10.30.089.	Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Disiplin Aparatur Se-Provinsi Riau	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	96		3	100
1.20.1.20.10.30.105.	Bimtek Perencanaan Penganggaran BKD Responsif Gender	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	85 orang	25 orang	60 orang	60 orang	-		85	100
	Perlombaan dalam Rangka HUT KORPRI	Jenis cabang olahraga yang diperlombakan dalam Rangka HUT KORPRI	3 kegiatan	-	200 orang	200 orang	97	200 orang		
1.20.1.20.10.30.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen Monitoring evaluasi program dan kegiatan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	96	1 dokumen	4	80
	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah Modul aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	15 aplikasi	8 aplikasi	1 Sistem	1 Sistem	93	1 sistem	10	67
127	monitoring dan evaluasi kenaikan pangkat PNS provinsi Riau							1.000 orang		
	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah pejabat Provinsi Riau yang mengikuti seleksi jabatan tinggi	101 jpt	0	36 JPT	36 JPT	81			
	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial yang disusun	3 dokumen	0	250 jabatan	250 jabatan	96	50 jabatan		
	Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi	Jumlah Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi	2 aplikasi	0	1 aplikasi psikometri dan data base	1 aplikasi psikometri dan data base	98			
	Penyusunan Materi/Alat Test	Jumlah materi/alat test yang tersusun	20 materi				-			
	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	3 dokumen	0	11 seleksi JPT	11 seleksi JPT	93	12 seleksi JPT		
1.20.1.20.10.51.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara					79,40			1.253,25
1.20.1.20.10.51.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah Administrasi Pindah Tugas PNS	10.600 orang	2.200 orang	1.500 orang	1.500 orang	94	1500 orang	5.200	49
1.20.1.20.10.51.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah Kenaikan Pangkat ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi	18.132 sk	5.775 sk	4.000 orang	4.000 orang	82	4000 orang	13.775	76
1.20.1.20.10.51.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	11.890 sk	5.890 sk	750 orang	750 orang	94	1000 orang	7.640	64
1.20.1.20.10.51.010.	Pengelolaan administrasi izin belajar	Jumlah Kegiatan Administrasi Izin Belajar	116 berkas	58 berkas	150 orang	150 orang	99		208	179
002	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang pensiun						400 orang		
1.20.1.20.10.51.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian	1.160 berkas	260 berkas	300 Berkas administrasi kepegawaian	300 Berkas administrasi kepegawaian	95	300 berkas administrasi kepegawaian	860	74
1.20.1.20.10.51.012.	Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik	Jumlah Kartu Pegawai Eleltronik	1.325 kpe	1.000 kpe	100 kpe	100 kpe	86		1.100	83
1.20.1.20.10.51.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah kegiatan Formasi PNS Provinsi Riau	5 dokumen	2 orang	250 formasi	250 formasi	85	500 formasi PNS	752	15.040
1.20.1.20.10.51.016.	Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2015-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisas Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20.1.20.10.51.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	7.095 orang	1.095	2.000 orang	2.000 orang	96	500 orang	3.595	51
1.20.1.20.10.51.019.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Terdata	9.084 dokumen	494 dokumen	8.100 orang	8.100 orang	99		8.594	95
1.20.1.20.10.51.020.	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	4.095 orang	1.095	2.000 orang	2.000 orang	63	500 orang	3.595	88
	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/ Kota se- Provinsi Riau							4.000 orang		
026	pengelolaan administrasi penggunaan gelar PNS pemerintah Provinsi Riau							50 Surat Keterangan		
1.20.1.20.10.51.021.	Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau	Jumlah berita Website BKP2D Provinsi Riau	5 website	2 website	70 berita	70 berita	99	70 berita	142	2.840
1.20.1.20.10.51.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	98	1 Dokumen	4	80
	Pengelolaan administrasi penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah fungsional tertentu yang telah ditetapkan angka kreditnya	370 sk	70 sk	50 orang	50 orang				
1.20.1.20.10.51.022.	Pembangunan Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah aplikasi sistem penatausahaan BKD Provinsi Riau						1 Aplikasi		
1.20.1.20.10.52.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur						48,06			39,00
1.20.1.20.10.52.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta Kepada PNS	380 orang	160 orang	80 orang	80 orang	95	80 orang	320	84
1.20.1.20.10.52.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah Pengelolaan Pensiun PNS	1.773 sk	773 sk	500 orang	500 orang	97		1.273	72

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas bahwasanya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau hanya melaksanakan urusan pemerintahan urusan penunjang, yang tidak menggunakan indicator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NSPK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Riau yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
2. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
3. Penerapan E-Government;
4. Belum akuratnya data pegawai melalui penrapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis eletronik;
5. Pemberlakuan single salary; dan
6. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur”

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal OPD.

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manejerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;

5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
6. Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi;
7. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja
8. Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi.

Sedangkan kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah:

Strategi 1 : Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial

- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan fungsional;
- Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- Melakukan seleksi terbuka bagi jabatan tinggi Provinsi Riau; dan
- Peningkatan wawasan aparatur sipil negara melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan Aparatur Sipil Negara dalam sistem pemerintahan.

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan PNS melalui pendidikan kedinasan beasiswa tugas belajar

- Pemberian kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan, bagi PNS yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan melalui tugas belajar mandiri, beasiswa.

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas kompetensi aparatus sipil negara melalui uji kompetensi

- Melakukan pemetaan jabatan bagi Aparatur Sipil Negara;

- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan;
- Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektivitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- Melakukan pelaksanaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- Melakukan pelaksanaan seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Strategi 4 : Peningkatan kualitas aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku aparatur sipil negara

- Penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi melalui pemantau disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Melakukan tindakan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara dan kode etik profesi; dan
- Penerapan penyampaian tentang laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHK-ASN) bagi seluruh aparatur sipil Negara.

Strategi 5 : Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara

- Pemberian fasilitas kepada PNS dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku;
- Pemberian perlindungan bagi aparatur sipil negara berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan bantuan hukum;
- Pemberian penambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara berupa tunjangan meliputi tunjangan kinerja dibayarkan dengan penilaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku melalui Penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara

yang didasarkan sistem prestasi dan karier yang dilakukan oleh tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara; dan

- Pemberian penghargaan terhadap aparatur sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Strategi 6 : Menyelenggarakan sistem manajemen kepegawaian yang profesional dan Menerapkan merit system dalam pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis teknologi.

- Melakukan penyusunan dokumen penetapan kebutuhan melalui penataan aparatur Sipil Negara yang ideal sesuai kebutuhan dan kompetensi (right sizzing) dengan pemetaan (Mapping);
- Melakukan penyusunan pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional
- Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS;
- Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem informasi ASN berbasis E-Kepegawaian dan satu pintu
- Meningkatkan profesional pelayanan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima
- Penerapan, evaluasi dan pembaharuan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan manajemen aparatur sipil negara untuk meningkatkan mutu pelayanan manajemen aparatur sipil negara;
- Pengembangan Aplikasi Manajemen Kepegawaian berbasis elektronik
- Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur sipil negara.
- Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, manajemen kepegawaian serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Strategi 7 : Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja

- Penerapan proses kegiatan dan program yang terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi 8 : Rehabilitasi sarana dan prasarana menjadi kantor modern berbasis teknologi untuk menciptakan pelayanan manajemen ASN yang prima serta pengembangan pusat assesment center berbasis teknologi yang terakriditas

- Peningkatan prasarana dan sarana kantor untuk pelayanan manajemen apartur sipil negara melalui sistem informasi berbasis E-Government perkantoran modern dengan sistem, informasi teknologi secara elektronik;
- Membangun UPT Aseessment untuk pengembangan dan pelaksanaan asesmnet center provinsi Riau dengan fasilitas dan sarana yang sesuai standar dan terakreditasi untuk pelaksanaan assessment.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;
2. Kedisiplinan pegawai yang masih rendah;
3. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum optimal;
4. Belum Akuratnya Data Kepegawaian;dan
5. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.

Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dan Manajemen pelayanan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam menciptakan pemerintahan yang handal dan terpercaya.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan bilamana adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Riau

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	5.765.124.764	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	4.815.562.864	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Rentang waktu pengiriman surat	12 bulan	23.514.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	2500 surat	23.514.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	1.146.885.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	1.103.160.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	14 unit	190.691.514	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	14 unit	170.291.514	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi keuangan			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	2 orang	84.000.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	823.500.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	765.420.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor daerah	12 bulan	143.918.200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor daerah	12 bulan	123.516.100	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	107.741.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	107.741.250	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1289 unit	82.529.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	82.529.800	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	23 unit	988.058.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	23 unit	210.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	69.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	69.000.000	
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	6.400 orang kali	202.000.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	6.400 porsi	150.000.000	
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	120 kali	900.342.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	120 kali	900.342.000	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	23 Orang	809.085.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	804.388.200	
14	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan BKD	Pekanbaru	Rentan pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	12 bulan	127.860.000	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan BKD	Pekanbaru	Rentang waktu pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	12 bulan	171.660.000	

15	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	1 kali	150.000.000	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Pekanbaru	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	1 kali	50.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	896.536.800	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	819.536.800	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	2 Unit	599.536.800	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	2 Unit	599.536.800	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	228 Unit	70.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	228 Unit	70.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	230 Unit	227.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	230 Unit	150.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	216.676.800	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	174.306.400	
1	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	135 Orang	122.940.000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Pekanbaru	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	135 Orang	87.769.600	
2	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling Psikologi	75 Orang	93.736.800	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Pekanbaru	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling Psikologi	75 Orang	86.536.800	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	218.605.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	320.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	26 Orang	218.605.000	Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	26 Orang	320.000.000	
V	Program Pendidikan Kedinasan		Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan dan tugas belajar	50 orang	4.317.998.000	Program Pendidikan Kedinasan		Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan dan tugas belajar	50 orang	5.443.965.900	
1	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	36 Tubel lama 3 tubel baru	4.317.998.000	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	39 orang	4.553.819.200	
2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1 orang	81.483.600	
3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	3 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	3 orang	348.539.000	
4	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Luar Daerah	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni sekolah Kedinasan	55 Orang	-	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Luar Daerah	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni sekolah Kedinasan	55 Orang	460.124.100	
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara	-	50.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara	-	2.227.703.800	

1	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	22 Orang		- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	22 Orang	265.088.000	
2	PORNAS Korpri	Luar Daerah	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	32 orang		- PORNAS Korpri	Luar Daerah	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	32 orang	451.396.800	
3	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	1 Kegiatan		- Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	1 Kegiatan	60.630.700	
4	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Pekanbaru	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	20 kali	50.000.000	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Pekanbaru	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	20 kali	27.000.000	
5	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	42 Orang		- Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	39 Orang	1.123.588.300	
6	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau	24 Orang		- Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau	24 Orang	300.000.000	
VII	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	3.412.028.336	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	2.983.299.800	
1	Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana	1.000 Orang	242.544.000	Satya Lencana Karya Satya	Pekanbaru	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana	1.000 Orang	242.544.000	
2	Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah Jabatan fungsional yang termonitoring	5.000 Orang	123.000.000						
3	Pengelolaan Website Badan Kepegawaian Daerah	Pekanbaru	Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun	100 Berita	50.477.800						
4	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	500 Orang	123.824.900	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	500 Orang	81.784.900	
5	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Berkas Kenaikan Pangkat Kabupaten/kota yang dimonitoring	2.000 berkas	120.000.000						
6	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	12 Kab/Kota	Jumlah SKP PNS yang diverifikasi	16.737 orang	170.777.600	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	12 Kab/Kota	Jumlah SKP PNS yang diverifikasi	16.737 orang	150.507.600	
7	Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	Kab/Kota	Jumlah JPT yang di monitoring dan dilaksanakan di 12 Kabupaten Kota	360 Orang	143.661.100						
8	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksana sesuai dengan kebutuhan	250 Orang	144.418.936	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pekanbaru	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksana sesuai dengan kebutuhan	250 Orang	390.950.700	
9	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru dan Kabupaten	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah	200 Orang		- Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Pekanbaru dan Kabupaten	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah	200 Orang	150.000.000	

10	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Pekanbaru	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	7.000 dokumen	271.000.000	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Pekanbaru	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	7.000 dokumen	236.156.000	
11	Pengelolaan Data Pegawai	Pekanbaru	Jumlah dokumen data kepegawaian Provinsi Riau	4 Dokumen	158.390.000	Pengelolaan Data Pegawai	Pekanbaru	Jumlah dokumen data kepegawaian Provinsi Riau	4 Dokumen	135.486.100	
12	Pemantauan disiplin PNS	Pekanbaru	Presentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya	20%	150.000.000	Pemantauan disiplin PNS	Pekanbaru	Presentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya	20%	67.147.800	
13	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Pekanbaru	Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani	80%	450.000.000	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Pekanbaru	Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani	80%	84.164.000	
14	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Pekanbaru	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	200 Orang	130.000.000	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Pekanbaru	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	200 Orang	135.619.600	
15	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	12 Kab/Kota	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	1 Dokumen	150.000.000	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	12 Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi program dan kegiatan Kabupaten Kota	1 Dokumen	150.000.000	
16	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provisnis Riau	1 Sistem/ Aplikasi/Modul	-	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provisnis Riau	1 Sistem/ Aplikasi/Modul	217.015.700	
17	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	34 JPT	814.413.000	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	34 JPT	741.923.400	
18	Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Jabatan Adminitrasi yang terseleksi melalui uji kompetensi untuk dipetakan berdsarakan	500 Orang	169.521.000						
19	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	1.200 Jabatan	-	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	1.200 Jabatan	200.000.000	
VIII	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	85%	552.160.100	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	85%	2.357.982.436	
1	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	1.500 Orang	-	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	1.500 Orang	350.000.000	
2	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	4.000 Orang	-	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	4.000 Orang	299.320.000	
3	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Provinsi Riau yang dikelola	1.100 Orang	-	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Provinsi Riau yang dikelola	1.100 Orang	324.150.000	
4	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pekanbaru	Pengelolaan Administrasi kepegawaian yang baik dan benar sesuai peraturan	350 Orang	86.707.000	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pekanbaru	Jumlah berkas kepegawaian yang dikelola	350 berkas	264.310.000	
5	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru dan Kabupaten	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	250 Formasi	-	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Pekanbaru dan Kabupaten	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	250 Formasi	184.795.400	

6	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya	500 Orang	-	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya	500 Orang	122.138.900	
7	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Pekanbaru	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Pekanbaru	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	1 Dokumen	137.068.000	
8	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Jumlah Pengelolaan Penetapan Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau	50 Orang	125.000.000	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pekanbaru	Jumlah Pengelolaan Penetapan Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau	50 Orang	117.579.100	
9	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Propinsi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	4.000 Berkas	-	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Propinsi	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	4.000 Berkas	350.000.000	
10	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	50 Orang	50.242.400	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	50 Orang	36.495.000	
11	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau	1 Aplikasi	114.640.000	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau	1 Aplikasi	172.126.036	
12	Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau yang mengambil sumpah dan pelantikan	300 Orang	25.570.700						
IX	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti	2%	-	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti	2%	286.775.800	
1	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	100 Orang	-	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	100 Orang	96.933.000	
2	Pengelolaan Pensiun PNS	Pekanbaru	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	500 Orang	-	Pengelolaan Pensiun PNS	Pekanbaru	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	500 Orang	189.842.800	
					15.429.129.800						19.429.133.800

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019 dan direvisi menjadi Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Disisi lainya Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019 yang telah direvisi menjadi Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2014-2019, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) kementerian/kelembagaan yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki *visi* “**Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani**” dan *misi* “**Penggerak Utama Reformasi Birokrasi**”.

Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi calon pegawai negeri sipil dan promosi pegawai negeri sipil secara terbuka
- d. Profesionalisasi pegawai negeri sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (*e-government*)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***“menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi”*** untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 6 (enam) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia pegawai negeri sipil;
- b. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian;
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010-2014 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Renstra Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi Yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***.

Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- c. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 3 (tiga) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standar pelayanan;
- c. Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip profesionalitas;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepegawaian mencakup proses rekrutment (pengadaan) PNS dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- e. Optimalisasi sistem kepegawaian berbasis informasi teknologi Sinkronisasi kebijakan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi di tingkat pusat dan daerah secara bertahap;
- g. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau adalah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi;
- h. Menyusun pedoman pembinaan dan pengembangan aparatur sesuai otonomi daerah menyiapkan peraturan - peraturan maupun petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengembangan aparatur;
- i. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, melalui identifikasi kebutuhan pegawai dan penyusunan standart pelayanan;
- j. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai rencana kerja pembangunan daerah melalui Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran ini juga memuat langkah-langkah strategi dan kebijakan yang diturunkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selaku institusi yang dipercaya sebagai pemegang peran sentral dalam melakukan manajemen pelayanan administrasi kepegawaian, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional,

transparansi, dan akuntabel demi terwujudnya reformasi birokrasi yang di cita-citakan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memperhatikan isu-isu yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta merumuskan permasalahan-permasalahan terkait menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Dalam menjalankan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Yang mana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diberikan tanggung jawab pada misi yang ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik” Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018 yaitu **“Terwujudnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang Profesional, Akuntabel dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2025 .**

Adapun misi yang ingin dijalankan berdasarkan visi diatas adalah :

1. Meningkatkan Mutu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau Pusat Pembinaan Aparatur;
2. Mengembangkan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai Pusat Pengembangan Aparatur dengan Tata Pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*);

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada visi organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan

III.3. Program dan Kegiatan

Renja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode. Adapun rincian rencana kegiatan perprogram serta indikator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019, sebagai terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.00.03.3.00.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100%	4.815.562.864	APBD Provinsi Riau		100%	6.387.862.458
3.00.03.3.00.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.5000 surat	23.514.000			2.5000 surat	23.517.000
3.00.03.3.00.03.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pekanbaru	12 bulan	1.103.160.000			12 bulan	1.236.229.500
3.00.03.3.00.03.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK	Pekanbaru	14 unit	170.291.514			14 unit	190.691.514
3.00.03.3.00.03.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Pekanbaru	2 orang	84.000.000			2 orang	84.000.000
3.00.03.3.00.03.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pekanbaru	12 bulan	765.420.000			12 bulan	823.500.000
3.00.03.3.00.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor daerah	Pekanbaru	12 bulan	123.516.100			12 bulan	100.500.000
3.00.03.3.00.03.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekanbaru	12 bulan	107.741.250			12 bulan	107.741.250
3.00.03.3.00.03.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	Pekanbaru	12 bulan	82.529.800			12 bulan	92.960.992
3.00.03.3.00.03.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	23 unit	210.000.000			110 unit	1.376.566.620
3.00.03.3.00.03.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pekanbaru	12 bulan	69.000.000			12 bulan	159.951.200

3.00.03.3.00.03.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	Pekanbaru	6.400 porsi	150.000.000			7.386 porsi	202.000.000
3.00.03.3.00.03.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kabupaten dan Luar Daerah	120 kali	900.342.000			120 kali	852.781.582
3.00.03.3.00.03.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantorRentang waktu	Pekanbaru	12 bulan	804.388.200			12 bulan	809.085.000
3.00.03.3.00.03.01.01.022.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan BKD	Rentang waktu pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	Pekanbaru	12 bulan	171.660.000			12 bulan	178.337.800
3.00.03.3.00.03.01.01.116.	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau (Riau Expo)	Pekanbaru	1 kali	50.000.000			1 kali	150.000.000
3.00.03.3.00.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100%	819.536.800	APBD Provinsi Riau		100%	1.097.000.000
3.00.03.3.00.03.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	Pekanbaru	2 Unit	599.536.800			5 Unit	800.000.000
3.00.03.3.00.03.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Pekanbaru	228 Unit	70.000.000			228 Unit	70.000.000
3.00.03.3.00.03.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT	Pekanbaru	230 Unit	150.000.000			253 Unit	227.000.000
3.00.03.3.00.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	174.306.400	APBD Provinsi Riau		100%	347.855.000
3.00.03.3.00.03.01.03.006.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental	Pekanbaru	135 Orang	87.769.600			135 Orang	62.240.000
3.00.03.3.00.03.01.03.016.	Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling Psikologi	Pekanbaru	75 Orang	86.536.800			150 Orang	285.615.000
3.00.03.3.00.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		100%	320.000.000	APBD Provinsi Riau		100%	368.605.000

3.00.03.3.00.03.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	Luar Daerah	26 Orang	320.000.000			29 Orang	368.605.000
3.00.03.3.00.03.01.15.	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan dan tugas belajar		50 orang	5.443.965.900	APBD Provinsi Riau		50 orang	7.523.704.700
3.00.03.3.00.03.01.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	Luar Daerah	39 orang	4.553.819.200			50 orang	5.528.600.200
3.00.03.3.00.03.01.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Luar Daerah	1 orang	81.483.600			1 orang	89.439.600
3.00.03.3.00.03.01.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Luar Daerah	3 orang	348.539.000			10 orang	980.064.900
3.00.03.3.00.03.01.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD terfasilitasi dan Pemberian Penunjang Pendidikan serta pembinaan Alumni sekolah Kedinasan	Luar Daerah	55 Orang	460.124.100			50 Orang	925.600.000
3.00.03.3.00.03.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara		-	2.227.703.800	APBD Provinsi Riau		-	4.742.132.300
3.00.03.3.00.03.01.16.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	Pekanbaru	22 Orang	265.088.000			22 Orang	370.000.000
3.00.03.3.00.03.01.16.068.	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	Luar Daerah	32 orang	451.396.800			32 orang	483.295.400
3.00.03.3.00.03.01.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	Pekanbaru	1 Kegiatan	60.630.700			1 Kegiatan	90.053.000
3.00.03.3.00.03.01.16.073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	Pekanbaru	20 kali	27.000.000			25 kali	59.769.100
3.00.03.3.00.03.01.16.080.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	39 Orang	1.123.588.300			60 Orang	1.520.038.800

3.00.03.3.00.03.01.16.081.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Luar Daerah	24 Orang	300.000.000			70 Orang	2.218.976.000
3.00.03.3.00.03.01.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional		100%	2.983.299.800	APBD Provinsi Riau		100%	5.219.678.368
3.00.03.3.00.03.01.17.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana	Pekanbaru	1.000 Orang	242.544.000			1.200 Orang	346.912.000
3.00.03.3.00.03.01.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	12 Kab/Kota	500 Orang	81.784.900			500 Orang	125.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Jumlah SKP PNS yang diverifikasi	12 Kab/Kota	16.737 orang	150.507.600			16.737 orang	170.777.600
3.00.03.3.00.03.01.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan	Pekanbaru	250 Orang	390.950.700			250 Orang	978.606.268
3.00.03.3.00.03.01.17.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah	Pekanbaru dan Kabupaten	200 Orang	150.000.000			400 Orang	413.150.000
3.00.03.3.00.03.01.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-document)	Pekanbaru	7.000 dokumen	236.156.000			7.000 dokumen	300.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.076.	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah dokumen data kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	4 Dokumen	135.486.100			7 Dokumen	450.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.087.	Pemantauan disiplin PNS	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya	Pekanbaru	20%	67.147.800			20%	180.900.000
3.00.03.3.00.03.01.17.088.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani	Pekanbaru	80%	84.164.000			80%	185.925.000
3.00.03.3.00.03.01.17.098.	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI	Pekanbaru	200 Orang	135.619.600			200 Orang	182.407.500

3.00.03.3.00.03.01.17.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	12 Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	200.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.114.	Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Sistem/ Aplikasi/Modul	217.015.700			1 Sistem/ Aplikasi/Modul	500.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.115.	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah Pejabat Tinggi yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	Pekanbaru	34 JPT	741.923.400			34 JPT	986.000.000
3.00.03.3.00.03.01.17.137.	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	Pekanbaru	1.200 Jabatan	200.000.000			1.200 Jabatan	200.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		85%	2.357.982.436	APBD Provinsi Riau		85%	3.799.939.500
3.00.03.3.00.03.01.18.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan Pindah Tugas PNS	Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau	1.500 Orang	350.000.000			1.500 Orang	400.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Jumlah ASN Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat	Pekanbaru	4.000 Orang	299.320.000			4.000 Orang	500.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah PNS Jabatan Fungsional Provinsi Riau yang dikelola	Pekanbaru	1.100 Orang	324.150.000			1.100 Orang	600.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Jumlah berkas kepegawaian yang dikelola	Pekanbaru	350 berkas	264.310.000			450 Orang	380.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan	Pekanbaru dan Kabupaten	250 Formasi	184.795.400			500 Formasi	393.650.500
3.00.03.3.00.03.01.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai dengan Jabatan dan Kompetensinya	Pekanbaru	500 Orang	122.138.900			500 Orang	683.349.000
3.00.03.3.00.03.01.18.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan dikelola	Pekanbaru	1 Dokumen	137.068.000			1 Dokumen	168.500.000

3.00.03.3.00.03.01.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pengelolaan Penetapan Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau	Pekanbaru	50 Orang	117.579.100			50 Orang	125.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Propinsi	Jumlah Dokumen Usulan Kenaikan Pangkat yang di Verifikasi	Pekanbaru	4.000 Berkas	350.000.000			4.000 Berkas	384.800.000
3.00.03.3.00.03.01.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengajukan Penggunaan Gelar	Pekanbaru	50 Orang	36.495.000			50 Orang	50.000.000
3.00.03.3.00.03.01.18.029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau	Pekanbaru	1 Aplikasi	172.126.036			1 Aplikasi	114.640.000
3.00.03.3.00.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti		2%	286.775.800	APBD Provinsi Riau		2%	491.238.800
3.00.03.3.00.03.01.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Pekanbaru	100 Orang	96.933.000			200 Orang	258.740.000
3.00.03.3.00.03.01.19.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	Pekanbaru	500 Orang	189.842.800			500 Orang	232.498.800
					19.429.133.800				29.978.016.126

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 memuat program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan akhir Renja disusun berpedoman kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RKPD Provinsi Riau. Rancangan akhir Renja menjadi sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan akhir Renja merupakan salah bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel. Disamping itu Renja juga merupakan tolak ukur capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, baik yang dilakukan secara individu, tim maupun institusi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan akhir Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah pengelolaan manajemen aparatur sipil negara dan penerapan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan, kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dengan melakukan perubahan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan penerapan prinsip merit diharapkan mampu menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah ke depannya perlu menyiapkan sarana

dan prasarana pendukung, disertai dengan dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.